



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAN www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BENOA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andri Fahrulsyah
Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan SDKP Benoa

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Adin Nurawaluddin
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Januari 2024

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Adin Nurawaluddin

PIHAK PERTAMA
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa

Andri Fahrulsyah

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BENOA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
SK1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	81
SK2	Terselenggaranya operasi armada Pengawasan SDKP yang efektif	2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	91
		3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	91
		4	Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas (persen)	100
SK3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	5	Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (persen)	100
		6	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana Pengawasan SDKP (persen)	100
SK4	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	7	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (nilai)	100
SK5	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	8	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (nilai)	100
SK6	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas	9	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80
		10	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	80
SK7	Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang berkualitas	11	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (indeks)	93
SK8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	12	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Pangkalan PSDKP Benoa menggunakan penilaian mandiri Satker dengan diasistensi oleh tim ZI PSDKP (nilai)	75
		13	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen)	100
		14	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	70

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		15 Indeks profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (indeks)	82
		16 Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Benoa (nilai)	84
		17 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen)	80
		18 Nilai implementasi Program Budaya Kerja Pangkalan PSDKP Benoa (nilai)	21
		19 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Benoa (inovasi)	1
		20 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (indeks)	80
		21 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen)	94
		22 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen)	80
		23 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen)	80
		24 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (nilai)	93,76
		25 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (nilai)	82

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	17.414.727.000
2.	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	284.500.000
3.	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	975.300.000
4.	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1.747.000.000
5.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	16.830.709.000
Total Anggaran Pangkalan PSDKP Bena Tahun 2024		37.252.236.000

Jakarta, 23 Januari 2024

PIHAK KEDUA

Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin

PIHAK PERTAMA

Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bena



Andri Fabrulsyah